

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HARIAN LEPAS
PADA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35
TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA
DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA**

SKRIPSI



Oleh

TAUFIQUR ROHMAN

NIM : 2019010037

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HARIAN LEPAS
PADA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35
TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA
WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA
DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN
HUBUNGAN KERJA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

TAUFIQUR ROHMAN

NIM : 2019010037

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2023**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HARIAN LEPAS
PADA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35
TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU
ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

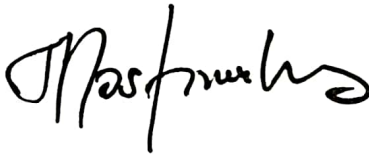
Nama : TAUFIQUR ROHMAN

N I M : 2019010037

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 23 Juni 2023

Pembimbing I,



Mashudi, S.H., M.H.
NIPY : 107102020160126

Pembimbing II,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Dara Puspitarsari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HARIAN LEPAS
PADA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35
TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU
TERTEHTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU
ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

NAMA : TAUFIQUR ROHMAN

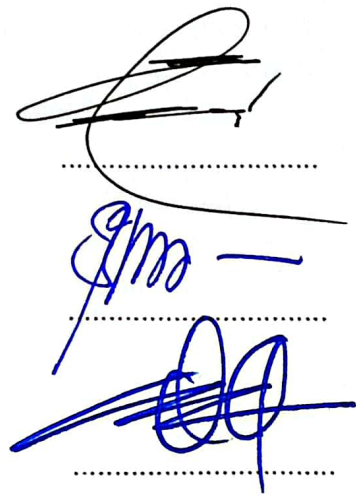
N.I.M : 2019010037

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 23 Juni 2023

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. Moch. Nasichin, S.H., M.H.
NIPY : 107102019850009
Ketua.
2. Zakiyah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020180132
Anggota.
3. Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020070040
Anggota.



Mengetahui,
Dekan,



Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020070040

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : TAUFIQUR ROHMAN

NIM : 2019010037

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S-1

Judul Tugas Akhir : PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 23 Juni 2023

Yang menyatakan,


TAUFIQUR ROHMAN
NIM : 2019010037

MOTTO

Mungkin benar bahwa hukum tidak bisa membuat seseorang mencintaiku, tetapi ia bisa mencegahku dihukum mati tanpa peradilan, dan menurutku itu penting.

(Martin Luther King, JR.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo`akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekatku yang selalu berdo`a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin.Yarobbalallamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

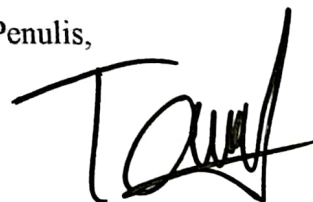
1. Ibu dr. Riski Prameswari, M.Kes. Rektor Universitas Gresik.
2. Bapak Rizki Kurniawan, S.H., M.Kn. Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
3. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H. Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

4. Bapak Mashudi, S.H., M.H. Dosen Pembimbing I dan Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn. Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2019 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 23 juni 2023

Penulis,



TAUFIQUR ROHMAN

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HARIAN LEPAS PADA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Taufiqur Rohman

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Kesejahteraan tenaga harian lepas untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus ada kepastian hukum sehingga Tenaga Harian Lepas (THL) pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten/Kota belum mendapatkan kejelasan dimana mereka bisa menuntut bila mana tenaga harian lepas terjadi perselisihan kerja, di dalam Pemerintahan khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (kemudian disebut SKPD) yang menangani Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dilapangan diangkat sebagai tenaga harian lepas dengan perjanjian kerja. Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana bentuk perjanjian kerja Tenaga Harian Lepas (THL) pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja; dan 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum Tenaga Harian Lepas (THL) pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjian pekerja Tenaga Harian Lepas (THL) pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), merupakan jenis pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), namun bagi pekerja yang masa kerjanya melebihi atau lewat dari 5 (lima) tahun berubah menjadi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dikarenakan bentuk kerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bentuk pekerjaan yang tidak bersifat musiman tetapi terus menerus, serta mengenai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), bahwa dalam hal terjadi permasalahan ketenagakerjaan pada Satuan polisi Pamong Praja dapat diselesaikan melalui perundingan biparti, yakni melalui 3 (tiga) cara yaitu: mediasi, konsiliasi dan arbitrase, bila mana melalui 3 (tiga) cara tersebut gagal, maka jalan penyelesaian satu-satunya melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Kata Kunci : Perlindungan Perlindungan; Tenaga Harian Lepas; Satpol PP.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION OF DAILY WORKERS IN THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 35 OF 2021 CONCERNING CERTAIN TIME WORK AGREEMENTS, OUTSOURCING, WORKING TIME AND REST PERIODS, AND TERMINATION OF EMPLOYMENT

Taufiqur Rohman

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

The welfare of freelance daily workers to be appointed as Civil Servant Candidates (CPNS) must have legal certainty so that daily workers are released in the Civil Service Police Unit (Satpol PP) Districts/cities get clarity where we can demand if there is a freelance daily labor there is a work dispute, within the Government, especially the Regional Apparatus Work Unit (later called SKPD) which handles the Civil Service Police Unit, the Civil Service Police Unit on duty in the field is appointed as freelance daily workers with work agreements. In writing this study, the author raised two problems. namely: 1) What is the form of work agreement, Freelance Daily Labor (THL) workers at the Civil Service Police Unit Service based on Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Certain Time Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination employment relations; and 2) What is the form of legal protection for Freelance Daily Labor (THL) workers in the Civil Service Police Unit based on Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Certain Time Work Agreements, Outsourcing, Working Time and Rest Time, and Termination of Employment

In this research, the author uses normative legal research methods using three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and comparative approach.

The results showed that the form of the Freelance Daily Labor (THL) worker agreement at the Civil Service Police Unit (Satpol PP), is a type of Certain Time Work Agreement (PKWT) worker, but for workers whose working period exceeds or exceeds 5 (five) years changes to Indefinite Time Work Agreement (PKWTT) workers because the form of work carried out by the Civil Service Police Unit is a form of work that is not seasonal but continuous, and regarding the form of legal protection for Freelance Daily Labor (THL) workers in the Civil Service Police Unit Service (Satpol PP), that in the event of labor problems in the Civil Service Police Unit can be resolved through biparti negotiations, namely through 3 (three) ways, namely: mediation, conciliation and arbitration, if through these 3 (three) methods fail, then the only way of settlement is through the Industrial Relations Court (PHI).

Keywords: Protection Protection; Freelance Daily Energy; Satpol PP.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Tinjauan Pustaka.....	11
1.5.1. Landasan Konseptual.....	11
1.5.2. Landasan Yuridis.....	18
1.5.3. Landasan Teori.....	18
1.6. Penelitian Terdahulu	19
1.7. Metode Penelitian	21
1.7.1. Jenis Penelitian.....	21
1.7.2. Metode Pendekatan	22
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	24
1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum.....	25
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	26
1.8. Sistematika Penulisan.....	27
BAB II PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS DI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
2.1. Perjanjian	28
2.2. Perjanjian Kerja.....	35
2.3. Tenaga Harian Lepas	42
2.4. Bentuk Perjanjian Kerja Pekerja Tenaga Harian Lepas.....	46

BAB III	PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA HARIAN LEPAS DI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
3.1.	Perlindungan Hukum.....	59
3.2.	Hak Dan Kewajiban Pkerja Tenaga Harian Lepas.....	61
3.3.	Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Tenaga Harian Lepas Di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja	69
BAB IV	PENUTUP	
4.1.	Kesimpulan.....	77
4.2.	Saran.....	78
 DAFTAR PUSTAKA		